USHULUNA: JURNAL ILMU USHULUDDIN
Vol. 12, No. 1, Juni 2026, (91-110)
ISSN: 2460-9692; E-ISSN: 2721-754X
http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/una

Tafsir dan Legitimasi Kekuasaan: Analisis Penafsiran Politis Bakri Syahid dalam *Tafsir Al-Huda*

Ali Thaufan Dwi Saputra[1] & Zulvia Tasya Azizah[2]
[1] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
ali.thaufan@uinjkt.ac.id
[2] UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
zulviatasya26@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penafsiran yang bernuansa "politis" dalam Tafsir al-Huda karya Bakri Syahid. Meskipun ayat yang ditafsirkan bukan ayat-ayat politik, adakalanya Bakri membawa penjelasan melintasi horizon politik. Penelitian ini menggunakan sumber data kepustakaan yaitu Tafsir al-Huda. Data yang diperoleh dideskripsikan dan dianalisis dengan menggunakan analisis-interpretatif, melalui identifikasi tema yang relevan dengan politik pembangunan; menafsirkan penafsiran Bakri; mengaitkan makna dengan konteks; serta memberikan pemaknaan teoritis sebagai kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada surah al-An'am: 138, al-A'raf: 201, al-Ra'd: 20, al-Qasas: 51 dan al-Thur: 6, Bakri menafsirkannya dengan mengaitkan program Pemerintah Orde Baru, seperti pembangunan nasional dan Pembangunan Lima Tahun. Temuan ini menjadikan karya tafsirnya tidak saja menjadi kitab keagamaan, tetapi juga mengakomodasi wacana politik dengan adanya "dokumen" perencanaan pembangunan nasional. Penelitian ini berkontribusi pada studi ilmu al-Qur'an dan Tafsir dengan mengungkapkan bahwa corak politik dalam penafsiran tidak selalu diterapkan pada ayat-ayat politik. Akan tetapi corak politik dapat muncul dalam penafsiran terhadap ayat-ayat yang tidak secara eksplisit berbicara tentang politik.

Kata Kunci: Bakri Syahid, *al-Huda*, politis, Pemerintah, Orde Baru

Abstract:

This research aims to analyze the interpretation that has a "political" nuance in Tafsir al-Huda by Bakri Syahid. Although the interpreted verses are not political verses, sometimes Bakri brings the explainer across the political horizon. This research uses a source of literature data, namely Tafsir al-Huda. The data obtained is described and analyzed using interpretative analysis, through the identification of themes relevant to development politics; interpreting Bakri's interpretation; associating meaning with context; and giving theoretical meaning as a conclusion. The results of the study show that in surah al-An'am: 138, al-A'raf: 201, al-Ra'd: 20, al-Qasas: 51 and al-Thur: 6, Bakri interprets it by associating New Order Government programs, such as

national development and Five-Year Development (Pelita). This finding makes his interpretation work not only become a religious book, but also accommodate political discourse with the existence of "documents" for national development planning. This research contributes to the study of al-Qur'an and Tafsir by revealing that political patterns in interpretation are not always applied to political verses. However, political patterns can appear in the interpretation of verses that do not explicitly talk about politics.
Keywords: Bakri Syahid, *al-Huda*, Political, Government, New Order

Pendahuluan

Penelitian yang meneliti penafsiran ayat politik Bakri Syahid dalam *Tafsir al-Huda* telah dilakukan peneliti sebelumnya seperti Izatul dan Hikmawati[1] serta Nurul Huda.[2] Namun demikian masih terdapat ruang kosong untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan penelitian tentang resepsi Bakri dalam penafsirannya di masa Orde Baru. Dalam beberapa penafsiran, Bakri menjelaskan ayat al-Qur'an dengan masukkan unsur program Pemerintah Orde Baru, seperti Pembangunan Nasional dan Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Penafsiran Bakri tersebut menunjukkan bahwa kondisi dan latar belakang seorang mufasir sangat memengaruhi dalam menafsirkan al-Qur'an.

Perkembangan penafsiran al-Qur'an di Indonesia telah berlangsung sejak lama sejak sebelum bangsa Indonesia merdeka. Aktivitas penafsiran al-Qur'an yang dilakukan para mufasir turut menunjukkan kecenderungan dialektik dengan zaman di mana tafsir tersebut ditulis. Studi yang dilakukan Howard M.

[1] Penelitian Izatul dan Hikmawati mengkaji surah al-Taubah:122 sebagai fokus utama, yang kemudian dikorelasikan dengan al-Nisa':59 dalam membahas konsep *ulil amri*, nasionalisme, dan kekuasaan dalam konteks Orde Baru dan budaya Jawa. Kedua peneliti tersebut menyimpulkan bahwa perintah jihad dalam surat al-Taubah: 122 dimaknai sebagai partisipasi dalam pembangunan negara. Adapun ulil amri dimaknai sebagai pemimpin yang menegakkan keadilan, mewujudkan kemakmuran tetapi dalam kerangka keberimanan kepada Allah. Lihat dalam: Izatul Muhidah Maulidiyah-Hikmawati Sultani, "Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan: Membaca Pandangan Bakri Syahid tentang Nasionalisme dalam Tafsir Al-Huda, *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis*, Vol. 2, No. 1, 2024, 35–50. https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i1.29202.

[2] Penelitian Nurul Huda memang banyak membahas ayat yang "berkorelasi" dengan isu politik seperti: surah Yunus:7 dan 19, al-Nur :28, al-Mu'minun :60 dan 111, al-Nisa' : 59 dan 83, al-Hujurat [49]: 6, al-Ra'd :21, dan al-Qasas :51. Beberapa ayat di atas menurut Nurul, digunakan oleh Bakri untuk menjelaskan Demokrasi Pancasila, pembangunan nasional, ketahanan nasional, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI), serta konsep ibadah politik, ideologi, hingga peran badan intelijen dalam menjaga stabilitas negara. Penelitian ini menyimpulkan adanya pengaruh Orde Baru saat itu terhadap penafsiran Bakri, sehingga menyebut tafsirnya bercorak *al-laun al-siyasi* (corak politik). Lihat dalam: Nurul Huda Maarif, Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi, *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, Vol II, No. II, July 2021, 69. https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Federspiel dalam *Popular Indonesian Literature of the Qur'an* menunjukkan jika sebuah kebijakan negara, turut berkontribusi membentuk produk penafsiran. Federspiel menunjukkan bahwa penafsiran mufasir Indonesia kerapkali dipengaruhi kondisi sosial politiknya.[3]

Suatu produk penafsiran, termasuk tafsir al-Qur'an, tidak lahir dalam ruang hampa. Setiap masa akan melahirkan corak, orientasi dan pendekatan yang khas. Kondisi dan suasana sosial, politik, dan budaya, akan menjadi latar belakangnya. Meminjam istilah Gadamer tentang *historically effected consciousness* bahwa dalam memahami sesuatu (termasuk teks keagamaan), manusia akan selalu dipengaruhi kondisi historisnya. Dengan argumen tersebut, cukup kuat untuk mengatakan bahwa seorang mufasir yang memahami al-Qur'an tidak akan bisa "netral" karena pembacaannya dipengaruhi latar sosial, politik, budaya hingga ideologi mufasir.[4] Dengan demikian, suatu penafsiran terhadap al-Qur'an bukanlah suatu penjelasan yang "tiba-tiba turun dari langit" atas nama petunjuk Tuhan, tetapi melalui dialog, menjelajah horizon sosial dan politik yang berkembang di masyarakat.

Gagasan Gadamer di atas sejalan dengan apa yang dikemukakan sosiolog Karl Mannheim dalam bukunya *Ideology and Utopia*. Ia menjelaskan bahwa dalam perspektif sosiologi pengetahuan, suatu pemikiran tidak terlepas dari suasana sosial pemikirnya.[5] Oleh sebab itu, produk pemahaman terhadap teks yang dihasilkan selalu berkaitan erat dengan latar sosial penafsirnya.

Di Indonesia sendiri, produk penafsiran yang sangat dipengaruhi kondisi sosial politik ditunjukkan oleh Bakri Syahid dalam karyanya: *Tafsir Al-Huda*. Sebagai seorang jenderal tentara yang dihidup di era Orde Baru di bawah kekuasaan Presiden Suharto, serta diangkat menjadi Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Yogyakarta, Bakri sulit melepaskan kepentingan penguasa ketika menafsirkan al-Qur'an. Bahkan, dalam beberapa bagian, ia menafsirkan secara "politis" serta menjadikan kitab tafsirnya sebagai media untuk "mengampanyekan" program utama Pemerintah Orde Baru, yaitu: Pembangunan Nasional.

Pengertian "politis", merujuk pada pandangan Andrew Heywood tentang politik yang mencakup seni pemerintahan, kebijakan atau pengaturan publik,

---

[3] Howard M. Federspiel, *Popular Indonesian Literature of The Quran*, (New York: Cornell University, Cornell Modern Indonesia Project, 1994), 138

[4] Hans Georg Gadamer, *Truth and Method*, Edisi Kedua, (London: Continuum, 1989), xxx

[5] Karl Mannheim, *Ideology and Utopia: An Introduction to Sosiology of Knowlegde*, (New York: Harcourt, 1954), 1-2

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

musyawarah dan mencapai mufakat, serta kekuasaan.[6] Dalam kerangka itulah, suatu penafsiran yang berkaitan dengan kebijakan suatu pemerintahan (penguasa), oleh peneliti disebut sebagai "penafsiran politis". Dengan sendirinya, tafsir al-Qur'an tidak lagi menjadi penjelas nash al-Qur'an, tetapi juga menjadi teks yang politis.

Penafsiran Bakri dalam beberapa ayat di *Tafsir al-Huda*, tidak hanya menunjukkan kecenderungan mendukung, tetapi juga memberikan legitimasi program Pemerintah Orde Baru. Selain itu, penyebutan istilah "penafsiran politis" juga didasarkan pada argumentasi sosok Bakri sebagai seorang mufasir yang akademis, tetapi pada saat yang sama ia juga seorang militer. Jabatan militer dalam struktur kekuasaan Orde Baru sangat dekat dengan Pemerintah, dan oleh karenanya memungkinkan Bakri bersikap subjektif dalam menafsirkan ayat.

Pada surah al-Thur: 6 misalnya, Bakri menafsirkan ayat tersebut berbeda dengan ayat-ayat sebelumnya. Secara umum, tafsirnya bersifat global (*ijmali*). Akan tetapi, pada ayat tersebut ia menjelaskan secara panjang, membawa ayat tersebut melintasi horizon sosial politik. Membaca penafsirannya, seolah membaca draf program kerja Pemerintah Orde Baru dalam menjalankan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Uraian serupa juga didapati pada ayat-ayat yang lain yang akan dibahas pada artikel ini.

Sejatinya, mengatakan bahwa penafsiran Bakri bias kepentingan politik Pemerintah Orde Baru, bukan hal baru. Seperti dikemukakan pada catatan kaki di awal, penelitian Nurul Huda telah mengungkapkan jika penafsiran Bakri sangat kenal nuansa politiknya. Ia bahkan sampai pada kesimpulan dan memunculkan istilah baru dalam khazanah ilmu tafsir: *al-laun al-siyasi* atau corak politik.[7]

Penelitian ini memiliki beberapa signifikansi, secara akademik mengisi celah dari penelitian sebelumnya. Selain itu, penelitian ini memperlihatkan bahwa

[6] Andrew Heywood, *Politics*, (Fourth Edition), (London: Palgrave Macmillan, 2013), 5

[7] Pengertian corak politik (*al-laun al-siyasi*) perlu dibuat konseptualisasi. Menyebut tafsir-tafsir yang mendukung gagasan penguasa, peneliti rasa masih belum bisa dikatakan sebagai corak politik. Oleh karena itu, penulis menawarkan bahwa corak politik setidaknya mencakup: pertama: tafsir yang mendukung gagasan penguasa (pemerintah). Kedua: tafsir yang mengkritik kebijakan penguasa. Ketiga: tafsir yang memberikan nasehat atau pesan moral kepada penguasa. Contoh pertama bisa dilihat misalnya pada penafsiran Bakri Syahid. Contoh kedua bisa dibaca pada penafsiran Hamka dalam *Tafsir al-Azhar*, yang mana dalam beberapa ayat terdapat kritiknya terhadap pemerintah. Demikian juga pada *Tafsir Tematik tentang Kelestarian Lingkungan Hidup* karya tim penulis Kementerian Agama, yang ternyata banyak memberikan kritik terhadap kebijakan negara. Sedangkan contoh yang ketiga dapat dibaca dalam penafsiran M. Quraish Shihab dalam tafsir tematik *Membumikan al-Quran*. Contoh yang kedua dan ketiga telah penulis kemukakan dalam buku penulis. Lihat dalam: Ali Thaufan Dwi Saputra, *Khazanah Tafsir Indonesia: Membaca Wacana Sosial, Politik dan Budaya dalam Tafsir Indonesia*, (Pamulang: Penerbit Dialektika, 2026)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

tafsir lokal berbahasa Jawa, tidak hanya menunjukkan kuatnya lokalitas dan ajaran luhur Jawa. Pada saat yang sama, tafsir (termasuk yang berbahasa lokal) memungkinkan di dalamnya terdapat uraian politik. Penelitian ini juga mendemustifikasi bahwa produk tafsir tidaklah bersifat "turun dari langit", tetapi merupakan produk pemikiran atas teks al-Qur'an yang berdialektika dengan kondisi sosial politik.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada kajian terhadap sumber-sumber tertulis yang relevan dengan tema penelitian. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah *Tafsir al-Huda* karya Bakri Syahid. Adapun sumber data sekunder diperoleh dari berbagai buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas penafsiran Bakri Syahid, terutama yang berkaitan dengan aspek penafsiran politik.

Data penelitian dikumpulkan melalui teknik dokumentasi dengan mengidentifikasi ayat-ayat dan penafsiran yang ditafsirkan secara "politis" oleh Bakri Syahid. Data yang telah terkumpul kemudian disajikan secara deskriptif untuk menggambarkan bentuk, karakteristik, dan kecenderungan politik dalam *Tafsir al-Huda*. Selanjutnya, data dianalisis dengan menggunakan pendekatan interpretatif melalui dua sub yaitu sub pendekatan historis dan sub pendekatan sastra, sebagaimana yang dirumuskan Sahiron.[8] Melalui dua sub-pendekatan di atas, peneliti berusaha mengungkap makna, konteks, dan kecenderungan penafsiran. Metode analisis-interpretatif dilakukan dengan tahapan: membaca teks *Tafsir al-Huda*, identifikasi tema yang relevan dengan politik pembangunan, menafsirkan makna, mengaitkan makna dengan konteks, serta memberikan pemaknaan teoritis sebagai kesimpulan.

Hasil dan Pembahasan

Mengenal Bakri Syahid "Sang Jenderal Mufasir" dan *Tafsir al-Huda*

Bakri Syahid lahir di Suronatan, Ngampilan, Yogyakarta pada 16 Desember 1918. Nama lahirnya adalah Bakri, dan Syahid merupakan nama yang disematkan dari nama ayahnya Muhammad Syahid. Bakri tumbuh dalam lingkungan yang pendidikan agamanya terbalut dalam budaya Jawa. Keluarganya pun aktif berorganisasi dalam persyarikatan Muhammadiyah.

[8] Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir", *Suhuf*, Vol. 12, No. 1, Juni 2019, 131–149. DOI: 10.22548/shf.v12i1.409

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Namun, masa kecil yang dilalui oleh Bakri tidaklah mudah, ia bahkan turut berjualan pisang goreng demi memenuhi kebutuhan keluarganya.

Bakri memulai kehidupan berumah tangganya bersama Siti Isnainiyah. Keduanya dikaruniai seorang anak yang diberi nama Bagas Arafah. Namun, sungguh disayangkan Bagas meninggal dunia pada usia 9 tahun. Dan untuk mengenang sang anak, ia menamai usaha penerbitan yang ia bangun dengan nama Bagas Arafah. Penerbit Bagas Arafah inilah yang menerbitkan karyanya, *Tafsir Al-Huda.*

Setelah kematian putranya, Bakri dan Isnainiyah tak kunjung dikaruniai anak. Atas alasan tersebut, ayahnya menyuruh Bakri untuk menikah lagi demi memiliki keturunan. Akhirnya ia menikahi seorang perempuan bernama Sunarti di usia 65 tahun pada 1983. Tidak ada keterangan mengenai Sunarti ini merupakan seorang janda yang memiliki anak atau tidak. Dari pernikahan Bakri dan Sunarti ini keduanya dikaruniai dua anak yang diberi nama Siti Arifah Manishati dan Bagus Hadi Kusuma. Bakri menderita sakit jantung hingga wafat di usia 76 tahun pada 1994. Ia wafat pada saat salat tahajud di kediaman istri pertamanya.[9]

Perjalanan intelektualnya dimulai di *Kweeckschool Islam Muhammadiyah*, kini sudah menjadi Madrasah Mu'allimin. Bakri hidup pada masa penjajahan, sehingga hal ini menjadikan ia sebagai seorang gerilyawan yang turut serta berperang melawan penjajah dan kemudian diangkat menjadi anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI). Setelah Bakri menamatkan pendidikannya pada tahun 1935, ia pindah ke kota Surabaya sebagai pengajar di salah satu sekolah Muhammadiyah Surabaya. Setelahnya, ia mengikuti program "Anak Panah" Muhammadiyah selama tujuh tahun hingga tahun 1942 di Bengkulu. Selama Bakri mengikuti program tersebut, ia tetap menjadi anggota militer. Bakri menempuh pendidikan sarjananya di Fakultas Syariah Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta pada tahun 1957. Ia menamatkan program sarjananya pada tahun 1963, dan kemudian pada tahun 1964 Bakri melanjutkan pendidikan militer di Fort Hamilton, New York, Amerika Serikat atas penugasan dari Jenderal Ahmad Yani.

Selama Bakri berkarir sebagai anggota militer, ia pernah mengemban beberapa posisi strategis. Di antaranya adalah, Komandan Kompi, Wartawan Perang No.6-MBT, Kepala Staf Batalyon STM-Yogyakarta, Kepala Pendidikan

[9] Neny Muthiatul Awwaliyyah, "Studi Tafsir Nusantara: Tafsir al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid al-Yogjawy", *Nun*, Vol. 7, No. 1, 2021, 122. https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.231

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Pusat Rawatan Ruhani Islam Angkatan Darat, Wakil Kepala Pusat Rohani (Pusroh) Angkatan Darat, Asisten Sekretaris Negara RI. Dalam lembaga politik, ia pernah menjabat sebagai Anggota MPR RI dari Fraksi ABRI pada 1977.

Bakri mendapatkan kepercayaan untuk menjadi Rektor IAIN Yogyakarta periode 1972-1976 karena kariernya di militer yang sangat erat dengan keagamaan Islam. Pada era Orde Baru, bukanlah hal asing jika seorang militer menempati jabatan sipil/non militer. Misalnya, pada era Orde Baru yang menjabat sebagai Menteri Agama dari kalangan militer di antaranya adalah, Letjen (Purn.) Alamsyah Ratu Perwiranegara (1978-1983) dan Laksda (Purn.) Tarmizi Taher (1993-1998). Penunjukan Bakri sebagai Rektor IAIN Yogyakarta tidak terlepas dari penolakan dari beberapa civitas akademika IAIN Yogyakarta. Namun, setelah mempertimbangkan latar belakangnya yang lahir dan tumbuh dalam lingkungan Muhammadiyah, ia berhasil mendapatkan kepercayaan sebagai Rektor di institusi pendidikan tinggi tersebut. dan latar belakangnya sebagai militer dipandang sebagai simbol loyalitas Islam terhadap negara.

Selama berkarir dalam dunia militer dan menjabat sebagai rektor, Bakri memiliki beberapa karya seperti: *Tata Negara RI, Ilmu Jiwa Sosial, Kitab Fikih, Kitab Aqaid, Ilmu Kewiraan Pertahanan dan Keamanan Nasional, Ideologi Negara Pancasila Indonesia,* dan *Tafsir Al-Huda Tafsir Quran Basa Jawi* sebagai karyanya yang paling masyhur

Tafsir Al-Huda merupakan kitab tafsir yang berbahasa Jawa dan ditulis dengan tulisan latin. Hal ini berdasarkan usulan beberapa kolega Bakri yang mayoritas adalah orang-orang Jawa yang merantau ke beberapa negara seperti Singapura dan Suriname. Bakri dan beberapa koleganya bertemu di rumah Abdul Manan di Makkah. Dan terdapat kemungkinan bahwa pertemuan ini terjadi saat Bakri sedang melaksanakan perjalanan umrah.[10]

Bagi orang-orang Muslim Jawa yang merantau ke Suriname, Tafsir Bahasa Jawa dianggap sangat penting. Dalam sejarah, Suriname merupakan negara di pesisir utara Amerika Selatan yang dulunya dijajah oleh Belanda. Pada masa itu, Belanda menerapkan sistem tanam paksa, sehingga banyak tenaga kerja yang ditempatkan di Suriname berasal dari Jawa. Dan hingga saat ini, populasi Suku Jawa di Suriname masih ditemukan.

Hasil pertemuan antara Bakri dengan koleganya inilah yang menjadi motivasi bagi Bakri untuk menulis tafsir yang berbahasa Jawa. *Tafsir Al-Huda*

[10] Neny Muthiatul Awwaliyyah, "Studi Tafsir Nusantara: Tafsir al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid al-Yogjawy", 124.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ditulis sebelum Bakri menjabat sebagai Rektor IAIN Yogyakarta, tepatnya pada tahun 1970. Bakri menulis tafsir ini selama tujuh tahun, sebagaimana tertulis dalam pengantar kitab *Tafsir Al-Huda* pada tanggal 2 Mei 1977. Maka, selama Bakri menjadi Rektor, ia tetap melanjutkan penulisan kitab tafsirnya. Dan *Tafsir Al-Huda* mulai dicetak pada tahun 1979.

Tafsir Al-Huda disusun berdasarkan *tartib al-mushafi*, diawali dari surah al-Fatihah hingga al-Nas. Metode yang digunakan oleh Bakri pada tafsir ini adalah *ijmali.* Hal ini dapat dilihat bahwa meskipun penafsirannya dari permulaan surah hingga akhir, penafsiran Bakri terbilang singkat dan tidak seluruh ayat ia tafsirkan.

Pada bagian awal *Tafsir Al-Huda,* Bakri mengemukakan bahwa ia menggunakan 41 buku yang ia jadikan sebagai sumber penulisan tafsir ini. Di antara sumber-sumber tersebut, Bakri menggunakan beberapa rujukan kitab tafsir seperti: *Fi Zhilalil Quran* karya Sayid Quthub, *Tafsir Al Maraghy* karya Ahmad Musthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al Manar* karya Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, *The Holy Quran* karya A. Yusuf Ali, *Tafsir Al Furqan* karya Ahmad Hasan. Selain itu, Bakri juga merujuk pada karya seniornya di IAIN Yogyakarta yaitu *Tafsir An Nur* karya Hasbi Ash-Shiddiqi.

Dalam kata pengantarnya, Bakri menulis:

> *Para sutrisna, luhuring Nagari sabab saking luhuring Budi-Budaya Ian Budi-Pakenining Bangsa, makaten ugi kosok wangsulipun. Wawasan Nusantara, gagasan kagunan kita piyambak, sampun anelak- aken kayakinanipun sarta anggarisaken kawicaksananipun, bilih ngagesang punika ateges gesang berjoang, inggih punika perjoanganipun manungsa-budaya ingkang sarwa mantep ing keamanan Ian kemakmuran!. Gadhah gregut ambengkas kamiskinan sarta kabodhohan wonten ing era Pembangunan tehnologi modern, ananging tetep kenceng angrembakakaken Kapribaden Nasional. Manungsa-budaya punika wonten cm-cmmpun khas, inggih punika aktif ing laladan (gatra) ideologi, ekonomi, politik, pertahanan, keama~an, agama, sosial Ian budaya!*

Jika diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, berarti:

> *Para cendekiawan (atau para pemikir), keluhuran suatu negara bersumber dari keluhuran budi budaya dan budi pekerti bangsanya, demikian pula sebaliknya. Wawasan Nusantara, sebagai gagasan luhur milik kita sendiri, telah meneguhkan keyakinannya serta menggariskan kebijaksanaannya, bahwa hidup itu bermakna hidup berjuang, yaitu perjuangan manusia-budaya yang dilakukan secara mantap demi terwujudnya keamanan dan kemakmuran. Memiliki tekad yang kuat untuk memberantas kemiskinan dan kebodohan pada era pembangunan teknologi modern, namun tetap teguh dalam mengembangkan kepribadian nasional. Manusia sebagai makhluk berbudaya memiliki ciri-ciri*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

khas, yaitu bersifat aktif dalam berbagai bidang (gatra), yakni ideologi, ekonomi, politik, pertahanan dan keamanan, agama, sosial, serta budaya.[11]

Kutipan Bakri di atas terasa jelas sekali, menunjukkan karakter khas sebagai seorang militer yang intelek, dan komitmen terhadap Pembangunan Indonesia. Pada pembahasan berikutnya, penulis akan memfokuskan pada ayat-ayat yang ditafsirkan Bakri dengan mengaitkan pada aspek Pembangunan Nasional. Penafsiran ini menunjukkan bahwa Bakri sangat terpengaruh oleh ciri Orde Baru yang menekankan pembangunan dan ingin meletakkan peran Islam dalam pembangunan tersebut.

Pembangunan Nasional Sebagai Identitas Pemerintah Orde Baru

Orde Baru merupakan sebutan bagi masa pemerintahan di Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Suharto selama 32 tahun (1966-1998). Orde Baru merupakan kelanjutan dari era Orde Lama yang tumbang di bawah pimpinan Presiden Suharto setelah terjadinya peristiwa Gerakan 30 September/PKI pada tahun 1965. Pada masa Orde Baru, pemerintahan Indonesia di bawah pimpinan Presiden Suharto bertekad kuat untuk mendirikan pemerintahan RI yang didasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 demi kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Sebelumnya, pada masa Orde Lama, terdapat perdebatan Panjang berkenaan dengan dasar negara yang menyebabkan kondisi keamanan tidak stabil. Dalam keadaan keamanan yang sudah tidak kondusif pada akhir masa Orde Lama, Presiden Sukarno menerbitkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) kepada Suharto untuk melaksanakan pengamanan di Indonesia. Dan berbekal surat tersebut, kemudian Suharto mengambil alih kepemimpinan menjadi Presiden Indonesia.[12]

Pada masa awal kekuasaan, rezim Suharto langsung dihadapkan dengan kondisi krisis multi-dimensi. Di antaranya adalah kemerosotan ekonomi dan ketidakstabilan politik yang membutuhkan penanganan masalah secepat mungkin untuk segera menciptakan stabilitas ekonomi dan politik. Maka pada masa awal Orde Baru berfokus pada upaya penyelamatan (*rescue operation).*[13]

Pada era Orde Baru, pembangunan nasional yang diupayakan pemerintah pada masa itu berpedoman pada suatu konsep yang disebut "Trilogi Pembangunan". Konsep ini terbagi ke dalam tiga hal, yakni: (1) pemerataan

[11] Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda*, (Yogyakarta: Penerbit Bagus Arafah, 1977),

[12] Tim Penyunting, *Buku Seri Tempo Rahasia-Rahasia Ali Murtopo*, (Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024) 17

[13] Budi Winarno, *Etika Pembangunan*, (Yogyakarta: Centre for Academic Publishing Service, 2013), 254.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

pembangunan, (2) pertumbuhan ekonomi, (3) stabilitas nasional. Salah satu wujud upaya pemerintah Orde Baru berdasarkan konsep trilogi adalah Repelita (Rencana Pembangunan Lima Tahun). Program ini berlangsung selama masa Orde Baru dan terbagi ke dalam enam tahapan. Titik berat pembangunan pada tiap-tiap tahapan, sebagai berikut:

1. Repelita 1 (1969-1974)
   Pada tahapan ini pemerintah memulai dengan memperbaiki kehidupan sandang, pangan, dan papan masyarakat; melakukan pembaruan dan pembangunan dalam bidang pertanian rakyat; mengubah susunan ekonomi masyarakat dari sektor agraris menuju sektor industri; mengembangkan pendidikan dengan mengadakan pembinaan untuk menanamkan nilai dan martabat rakyat Indonesia yang dilandaskan pada Pancasila.
2. Repelita II (1974-1979)
   Program pada tahapan kedua berfokus pada terwujudnya stabilitas kehidupan sandang, pangan, dan papan masyarakat; pemerataan kesejahteraan rakyat; perluasan sarana dan prasarana; terciptanya lapangan kerja yang luas; memperkuat struktur perekonomian Indonesia.
3. Repelita III (1979-1984)
   Pelaksanaan program pada tahapan ketiga ini menargetkan pemerataan di beberapa bidang. Yakni pemerataan pada pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, pemerataan pelayanan Kesehatan serta pendidikan, pemerataan pendapatan, pemerataan peluang pekerjaan, pemerataan peluang usaha, pemerataan pembangunan dan juga keadilan.
4. Repelita IV (1984-1989)
   Pengembangan pada program ekspor komoditas industri menjadi fokus pada Pelita IV. Program ini ditujukan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan industri. Peran dunia usaha sangat diperlukan dalam upaya ini untuk meningkatkan kemampuan Indonesia di bidang ekspor. Hal ini diwujudkan dengan melanjutkan usaha-usaha menuju swasembada. Selain itu, pemerintah juga menyusun Standar Industri Indonesia (SII) untuk menunjang pembangunan industri. Pemerintah juga membuat konsep Wilayah Pusat Pertumbuhan Industri (WPPI) untuk menjaga pembangunan industri dasar tidak terpencar dan tetap efektif.
5. Repelita V (1889-1994)
   Pada Repelita V, usaha pada sektor pertanian masih menjadi fokus Presiden Suharto. Yakni dengan memperkuat swasembada pangan, menambah produksi pertanian, memaksimalkan tenaga kerja yang sudah ada, dan dapat menghasilkan mesin-mesin industri secara mandiri.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

6. Repelita VI

   Pembangunan pada Pelita VI dititikberatkan pada sektor ekonomi yang berkaitan dengan industri dan pertanian dan menaikkan mutu sumber daya manusia sebagai pendukung. Namun terjadi gejolak situasi politik yang disebabkan oleh terjadinya krisis moneter di Indonesia. Hingga terjadi banyak demonstrasi dari mahasiswa yang didukung oleh masyarakat, yang menyebabkan runtuhnya masa pemerintahan Orde Baru dengan mundurnya Presiden Suharto setelah berkuasa selama tiga puluh dua tahun.[14]

Uraian tentang proyek pembangunan di atas, menunjukkan bahwa pemerintah Orde Baru memberikan perhatian khusus pada terciptanya pembangunan yang berkelanjutan. Peta jalan pembangunan telah dirancang secara bertahap, mulai Pelita I hingga VI. Peta rancangan pembangunan tersebut seakan menjadi agenda bersama seluruh pemangku kepentingan, mulai dari birokrasi bahkan militer. Dan agenda bersama tersebut juga tampak pada teks keagamaan, dalam hal ini tafsir al-Qur'an yang ditulis oleh Bakri Syahid, seorang jenderal sekaligus pimpinan perguruan tinggi (bisa dikatakan birokrat).

Penafsiran Politis Bakri Syahid dalam *Tafsir al-Huda*

Dalam beberapa ayat yang ditafsirkan Bakri, penulis mengidentifikasi beberapa ayat yang ditafsiri dengan memasukkan "kampanye" Pembangunan Nasional Indonesia. Paling tidak terdapat beberapa ayat yang di dalamnya terdapat pesan Pembangunan Nasional dan program Pembangunan Lima Tahun (Pelita) sebagaimana terdapat surah al-An'am: 138, al-A'raf: 201, al-Ra'd: 20, al-Qasas: 51 dan al-Thur: 6.

Pertama: penjelasan ayat yang dihubungkan dengan Pembangunan Nasional pada Surah Al-An'am: 138 "Mereka berkata menurut anggapan mereka, "Inilah hewan ternak dan hasil bumi yang dilarang, tidak boleh dimakan, kecuali oleh orang yang kami kehendaki. Ada pula hewan yang diharamkan punggungnya (tidak boleh ditunggangi) dan ada hewan ternak yang (ketika disembelih) boleh tidak menyebut nama Allah." (Hal itu) sebagai kebohongan terhadap Allah. Kelak Allah akan membalas semua yang mereka ada-adakan."

[14] Penjelasan tentang Repelita diolah dari berbagai sumber: Rizki Rahmawati, "Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru", *Etnoshistori,* Vol 9 No. 2, 2022, 38; Arina Romarina. dkk, *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Praktik),* (Sleman: Deepublish Digital, 2024), 24-26; Rifqah Harahap, dll, *Perekonomian Indonesia: Teori dan Kebijakan dalam Konteks Pembangunan*, (Sumbar: Penerbit Lenggo Geni Pustaka, 2026), 46

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Ayat di atas mengecam tindakan orang-orang jahiliah yang membuat ketentuan atau aturan tentang hewan dan hasil bumi yang boleh dimakan dan dimanfaatkan secara mengada-ada. Dalam menjelaskan ayat ini, dengan menukil pendapat Qatadah, Ibn Katsir mengatakan bahwa yang menyuruh orang-orang jahiliah membuat ketentuan tersebut adalah setan-setan yang mereka agungkan. Tindakan yang mereka lakukan adalah kebohongan dan fitnah, yang kelak akan mendapat hukuman dari Allah.[15]

Ayat di atas memang menjelaskan bagaimana orang-orang musyrik membuat aturan tentang pembagian hasil pertanian dan peternakan. Para musyrikin tersebut mengada-ada dengan membagi hasil tani dan ternak itu menjadi tiga, yaitu: hasil tani dan ternak yang tidak boleh dimakan dan hanya didiamkan saja; hewan ternak yang tidak boleh ditunggangi; serta hewan ternak yang ketika disembelih tidak boleh mengucap kalimat Allah atau atas nama Allah. Apa yang dilakukan oleh kaum musyrik tersebut merupakan tindakan yang mengarah pada praktik takhayul dan tidak rasional.

Sebagai sebuah karya kitab tafsir yang hadir di masa Orde Baru, penjelasan Bakri terhadap ayat di atas menunjukkan nuansa dan ciri khas Orde Baru yaitu Pembangunan Nasional. Seperti disebutkan di atas, bahwa pemerintahan Orde Baru memang menekankan aspek pembangunan bangsa. Setelah mencermati *Tafsir Al-Huda*, peneliti mendapatkan adanya penafsiran yang berkorelasi dengan program Pembangunan Nasional Indonesia saat itu.

Ketika menyebutkan praktik mengada-ada dari orang-orang musyrik tersebut, Bakri menyinggung jika hal-hal yang berbau sinkretisme seperti itu masih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia. Praktik sinkretis tersebut menurut Bakri dapat menghambat program Pembangunan Nasional. Penjelasan Bakri ini memberi kesan bahwa suatu pembangunan akan terwujud didasarkan pada pola pikir yang rasional.

> *"Pramila penetrasi (nyampur ing babagan kapitadosan utawi sinkretisme) saking pokalipun tiyang musyrik wau badhe awon sanget akibatipun wonten alaming pembangunan Nasional kita"* (Oleh karena itu, penetrasi [pencampuran dalam hal kepercayaan atau sinkretisme] dari ulah orang musyrik tersebut akan sangat buruk akibatnya bagi alam pembangunan nasional kita) demikian tulis Bakri.[16]

Ajaran sinkretisme di Indonesia khususnya di Jawa telah muncul sejak lama memberi corak tersendiri dalam keberislaman seorang Muslim. Beberapa

[15] Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Maktabah Aulad Li Syakh al-Turast, 2000), Vol. 6, 183

[16] Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda*, 248

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

peneliti menyebutnya sebagai sinkretisme Islam, di mana seorang Muslim memadukan nilai-nilai Islam dengan Jawa. Istilah lain untuk menyebut praktik sinkretis tersebut adalah Islam Kejawen.[17]

Kedua: Surah Al-A'raf: 201"Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, jika mereka dibayang-bayangi pikiran jahat (berbuat dosa) dari setan, mereka pun segera ingat (kepada Allah). Maka, seketika itu juga mereka melihat (kesalahan-kesalahannya)."

Ayat tersebut di atas menerangkan bahwa ketakwaan seorang Muslim ditunjukkan melalui sikap kewaspadaan terhadap cobaan dan godaan dari setan. Berbagai godaan setan bisa datang kapan saja. Oleh sebab itu, ayat ini juga menekankan pentingnya berzikir mengingat Allah. Dengan mengingat-Nya, akan menjauhkan dari kesalahan dan menyadari akan kesalahan yang diperbuat serta segera melakukan tobat. Dalam menjelaskan ayat tersebut, Wahbah al-Zuhaili menukil sebuah hadis yang menceritakan bahwa manusia mendapat bisikan dari setan dan malaikat. Bisikan setan berupa ajakan untuk melakukan perbuatan keji, dan bisikan malaikat mengajak manusia untuk berbuat kebajikan.[18]

Ketika menafsirkan surah al-A'raf: 201, Bakri mengaitkan dengan pentingnya Pembangunan Nasional, yang dapat terwujud dengan sumber daya manusia yang bertakwa kepada Allah. Menurut Bakri, ketakwaan kepada Allah adalah dasar budi pekerti. Dari budi pekerti tersebut kemudian diturunkan ke dalam akhlak atau yang dalam bahasa modern disebut etika. Bakri menyebut ada empat etika yang harus dimiliki para pemimpin, guru, ulama hingga masyarakat pada umumnya. (1) Hikmah. Menurut Bakri, sesuatu yang dapat dicapai oleh akal, maka akan dapat dicari kebenarannya. Dengan hikmah atau kebijaksanaan, orang akan lebih memiliki tanggung jawab, saling menghargai dan menjadi pribadi yang dewasa.

(2) *Iffah* atau menjaga diri. Setiap orang hendaknya menjaga diri dari melakukan tindakan buruk dengan menuruti hawa nafsu. Dari *iffah* ini, maka akan lahir pribadi yang jujur, terampil, juga lemah lembut penuh kasih sayang. (3) *Syaja'ah* atau keberanian. Setiap orang harus berani menundukkan kejahatan. Jika etika keberanian sudah dilakukan, maka akan melahirkan individu yang kuat pemberani. (4) Adil. Sikap adil harus selalu meresap dalam pribadi manusia. Jika seseorang telah mampu menerapkan sikap adil, maka ia

[17] Sri Harini, *Tasawuf Jawa*, (Yogyakarta: Araska, 2019), 66

[18] Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2009), Vol. 5, 232

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

akan dihargai orang lain. Di bagian akhir penjelasannya, Bakri menyebut bahwa keempat etika tersebut adalah syarat untuk mencapai tujuan dari Pembangunan Nasional bangsa.[19]

Penjelasan Bakri di atas menunjukkan pentingnya ketakwaan seseorang. Ketakwaan tidak hanya menyelamatkan seorang individu di akhirat kelak. Akan tetapi, ketakwaan juga menjadi faktor penentu pembangunan bangsa dapat dilakukan. Takwa tidak hanya diartikan sebagai sikap teologis tentang hubungan seorang hamba dengan tuhan, tetapi Bakri "membawa" ketakwaan lebih membumi: sebagai faktor penentu pembangunan.

Ketiga: Surah Al-Ra'd: 20 "(Yaitu) orang-orang yang memenuhi janji Allah dan tidak membatalkan perjanjian." Ayat tersebut menjelaskan pentingnya mematuhi janji dengan Allah dan larangan mengingkarinya. Ketika menafsirkan ayat di atas, Wahbah menyebut beberapa sifat seorang *ulul albab*. Menurutnya terdapat sembilan ciri dan karakteristik *ulul albab* yaitu: memenuhi janji baik kepada diri sendiri untuk menegakkan tauhid dan sesama manusia, tidak melanggar perjanjian, menyambung tali silaturahmi, takut kepada Allah, takut kepada azab-Nya, sabar menjalankan perintah Allah dan menghadapi musibah Allah, mendirikan salat, berinfak dan membalas keburukan dengan kebaikan.[20]

Pada penafsiran ayat di atas, Bakri memberi penekanan mengenai pentingnya seseorang menepati janji. Ia memberi perumpamaan jika orang sering ingkar janji dan tidak komitmen seperti *"oglak-aglik kados siwur pothol!"*. Ungkapan ini berarti seperti gagang gayung yang terbuat dari kayu, tetapi karena tidak kuat atau longgar, sehingga ketika digunakan mengangkat air bergoyang-goyang. Akibat goyangan tersebut, air dapat tumpah. Ungkapan tersebut merupakan sindiran bahwa orang yang sering ingkar janji merupakan orang yang lemah dan tidak memiliki pendirian.

Pada bagian akhir, Bakri juga menyinggung kebiasaan pejabat negara, para sarjana bahkan pemuka agama di Indonesia yang masih belum bisa menepati janji karena seringkali *"jam ngaret"* atau terlambat menepati janji atau suatu acara yang sudah ditetapkan waktu pelaksanaannya. Kebiasaan tersebut merupakan hal buruk dan jika terus dipelihara maka akan menghambat Pembangunan Nasional. Bakri membandingkan dengan etos kerja dan disiplin di negara maju seperti Jepang, dan beberapa negara Eropa lain untuk memberikan kritik pada praktik *"jam ngaret"* di Indonesia.[21]

[19] Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda*, 303
[20] Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsir al-Munir*, Vol. 7, 165-168
[21] Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda*, 450

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Keempat: Selain istilah Pembangunan Nasional yang menjadi ilustrasi dalam penafsiran al-Qur'an, Bakri juga menjelaskan Pembangunan Lima Tahun (Pelita) sebagai unsur penafsirannya, misalnya terdapat pada surah al-Qasas: 51, "Sungguh, Kami benar-benar telah menurunkan perkataan itu (al-Qur'an) secara berkesinambungan untuk mereka agar selalu mengingatnya."

Surah al-Qasas: 51 ini menjelaskan tentang sebagaimana al-Qur'an turun secara berangsur-angsur sebagai peringatan bagi manusia pada masa itu tidak pernah terputus. Ayat demi ayat diturunkan oleh Allah dan disampaikan oleh Nabi Muhammad secara bertahap tanpa henti agar mereka mau mengingat dan mempercayai serta mengambil pelajaran.[22] Apabila mereka tetap mengingkari kebenaran yang telah ditunjukkan karena mengikuti hawa nafsu mereka, maka celakalah mereka.[23]

Dalam menafsirkan ayat di atas, Bakri memberi penjelasan bahwa turunnya wahyu secara bertahap, sangat berkaitan erat dengan kemampuan masyarakat Arab saat itu dalam memahami wahyu. Hikmah dari turunnya ayat sedikit demi sedikit adalah untuk memudahkan penerima wahyu memahami maksud Allah. Meski demikian, ketika menafsirkan ayat di atas, Bakri membawa pada suatu kondisi seolah menjadi adalah "juru bicara" Pemerintah. Ia menggambarkan proses turunnya wahyu yang bertahap agar masyarakat Makkah dan Madinah saat itu dapat mudah mencerna firman Allah dengan kebijakan politik Orde Baru saat itu. Kebijakan politik yang dimaksud di sini adalah program Pembangunan Lima Tahun (Pelita). Selama berkuasa, Orde Baru telah menetapkan Pelita tersebut secara bertahap, mulai dari Pelita I, II, III dan seterusnya.

Meski ayat al-Qur'an turun secara bertahap, tetapi antara satu ayat dengan yang lain memiliki keterkaitan. Demikian halnya dengan program yang dijalankan Pemerintah Orde Baru saat itu, meski program tersebut ditetapkan secara periodik, yaitu lima tahunan, akan tetapi memiliki hubungan yang terintegrasi. Baik Pelita I, II hingga V, semuanya saling berkelanjutan. Pada bagian akhir, Bakri menegaskan yang demikian mengandung *Hikmah Qur'aniyah* yang patut dilaksanakan umat Islam.[24]

Kelima: uraian tentang Pelita dalam penafsiran Bakri juga didapati pada surah al-Thur: 6.[25] Ayat ini dijelaskan oleh Hamka bahwa Sa'id bin al-

[22] Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an,* (Tangerang: Lentera Hati, 2005), 365

[23] Hamka, *Tafsir Al-Azhar,* (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, tt), 5348

[24] Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda*, 756

[25] Bakri Syahid, *Tafsir Al-Huda*, 756

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Musayyab menjelaskan dari Ali bin Abu Thalib bahwa lautan meskipun ia adalah genangan air di bawahnya air laut itu mengandung panas. Sebagaimana perkembangan teknologi telah membuktikan bahwa di bawah laut terdapat minyak bumi yang menjadi bukti nyata bahwa lautan bisa mendidih. Tidak jarang terjadi kecelakaan antar kapal-kapal tangki yang membawa minyak dari bawah laut dan menyebabkan ledakan yang disebabkan adanya minyak di dalam kapal sehingga api menjalar di atas lautan. Ayat ini dikaitkan oleh Hamka dengan Surat at-Takwir ayat 6 *"Demi apabila lautan mendidih"* yang juga menjadi peringatan bagi manusia kemungkinan dari luasnya lautan yang ada di bumi mengelolakan api dari dalamnya saat kiamat datang.[26]

Berbeda dengan penafsiran pada ayat lainnya, dalam menafsirkan ayat ini, Bakri memberikan penafsiran yang cukup panjang. Ia memulai dengan ulasan bahwa Indonesia memiliki kekayaan alam berupa panas bumi yang melimpah. Panas bumi Indonesia telah diolah oleh para ahli baik dari dalam dan luar negeri. Dalam penafsirannya, Bakri melakukan kesalahan dalam menjelaskan panas bumi yang ia sebut sebagai *Liquefied Natural Gas* (LNG). Padahal, istilah panas bumi dengan LNG adalah sesuatu yang berbeda.

Selanjutnya, Bakri menjelaskan kekayaan alam Indonesia berupa gas alam cair (*Liquefied Natural Gas*) yang berada di Bontang, Kalimantan Timur dan Arun, Aceh.[27] Cadangan LNG pada dua tempat tersebut diklaim Bakri lebih besar ketimbang LNG di beberapa negara lain. Setelah penemuan LNG itu, kemudian dirancang kapal-kapal yang siap mengangkut hasil gas tersebut ke berbagai negara. Pada Agustus 1977 hingga April 1978, LNG tersebut telah diekspor ke Jepang dengan jumlah yang sangat besar, 3.696.179 meter kubik. Disebutkan bahwa kontrak dengan Jepang disepakati selama 20 tahun.

Ekspor hasil LNG ini merupakan proyek "raksasa" dan strategis bagi Indonesia. Bakri menyebut bahwa proyek ini berkontribusi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk menguatkan pendapatnya itu, ia mengutip Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 3, "Bumi dan air dan kekayaan alam

[26] Hamka, *Tafsir Al-Azhar, 6941*

[27] Berdasarkan penelusuran peneliti, Kilang LNG di Bontang yang dikelola oleh PT Badak NGL merupakan kilang gas alam cair terbesar di Indonesia dan paling berpengaruh di industri energi dunia yang mulai dibangun sejak tahun 1974. Kilang gas alam cair di Arun, Aceh yang dikelola oleh PT Arun NGL juga merupakan sejarah terbesar bagi industri energi dan pernah menguah lanskap perekonomian Indonesia. Ladang gas di Arun, Aceh ini ditemukan pada tahun 1971 dan mulai dibangun pada tahun 1974 serta resmi beroperasi pada tahun 1978. Lihat pada sumber berikut ini: https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/557. Lihat juga dalam: https://projectmultatuli.org/warisan-arun-ngl-dan-jejak-suram-kota-petrodolar-lhokseumawe/ .

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat". Bakri juga memberikan perhitungan bahwa dari ekspor tersebut, memberi keuntungan hingga 3.000 juta USD (sekarang setara dengan Rp. 53.070.000.000.000 [lima puluh tiga triliun tujuh puluh miliar rupiah] berdasarkan nilai tukar saat ini sekitar Rp. 17.600 terhadap dolar AS).

Selanjutnya, Bakri juga mengemukakan rencana Pelita III dalam rentan waktu 1979-1984. Pada Pelita III tersebut, Pemerintah akan membangun Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Air sebesar 296 Megawatt (setara dengan 296.000.000 Watt); Pembangkit Listrik Tenaga Uap sebesar 1.780 Megawatt (setara dengan 1.780.000 kilowatt); Pembangkit Listrik Tenaga Diesel sebesar 478 Megawatt; Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi sebesar 30 Megawatt; Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro sebesar 15 Megawatt; serta pembangkit listrik yang diperuntukkan bagi desa-desa.

Setelah mengemukakan rencana Pelita III itu, Bakri menjelaskan musibah yang terjadi di Tegala Sinilia Dieng Wonosobo akibat letusan freatik[28] dan gas beracun mematikan pada 20 Februari 1979. Musibah itu mengakibatkan korban jiwa sebanyak 136 orang. Menurut Bakri musibah tersebut menghadirkan banyak hikmah. Setelah dinyatakan sebagai daerah berbahaya, warga di sekitar Tegala Sinilia tersebut bertransmigrasi ke Sumatera, menjadi transmigran dengan bekal dan modal dari Pemerintah.[29]

Selain itu pada Mei 1979, PT. Pertamina melakukan pengeboran untuk dua sumur panas bumi di Sikidang yang kedalamannya mencapai lebih dari 1000 meter. Dengan dibangunnya pembangkit listrik tenaga panas bumi itu, maka dapat menyumbang sumber listrik baru. Panas bumi tersebut merupakan kekayaan alam dan amanat dari Allah untuk terus di jaga. Lebih lanjut, Bakri juga mengatakan bahwa aktivitas pengeboran sumur itu bukan merusak alam, tetapi memanfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar bagi masyarakat Indonesia. Berkenaan hal itu, Bakri menulis:

> *Dados peparingipun Allah SWT dhumateng kita bangsa Indonesia, ingkang Negarinipun adhedhasar falsafah Pancasila, punika cetha sanget bilih, manfa'ataken lan suka syukur sih kani'matan wau dados kuwajiban lan tanggel jawab kita sami. Kita dados jejering ngagesang dados manungsa, boten*

[28] Letusan freatik adalah letusan vulkanik akibat adanya pemanasan dan tekanan air tanah yang telah menjadi uap. Djoko Wintolo, *Kamus Istilah Geologi*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024), 128

[29] Sejak masa dulu, khususnya pada masa Orde Baru para transmigran difasilitasi modal oleh pemerintah berupa tanah dan lahan usaha, jaminan hidup, paket alat pertanian dan sarana produksi, serta transportasi dan uang saku. Lihat pada sumber berikut ini: https://www.transmigrasi.go.id/profil/informasi-kementrans-lengkap/

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

> *naklukaken alam, boten! Nanging kita mendhet manfa'atipun alam (peparing lan amanatipun Allah) lan kedah dipun dum radin ingkang sami-sami hak nampi kamakmuran.* (Jadi pemberian Allah SWT kepada kita bangsa Indonesia, yang negaranya berdasarkan falsafah Pancasila, itu sangat jelas bahwa memanfaatkan dan mengucapkan rasa syukur atas kasih Kenikmatan tersebut menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai sesama makhluk hidup yang menjadi manusia, tidak menaklukkan alam, tidak! Melainkan kita mengambil manfaat dari alam [pemberian dan amanat Allah] dan harus dibagi rata kepada yang sama-sama berhak menerima kemakmuran)

Setelah mengemukakan program Pembangunan yang akan dilaksanakan pemerintah pada sektor energi seperti minyak bumi, panas bumi, panas surya, Bakri menambahkan bahwa masih akan ada lagi program Pemerintah yang akan dilakukan yaitu mengembangkan energi dari tenaga nuklir di bawah komando Achmad Baiquni, seorang fisikawan ahli nuklir terkemuka. Bakri menutup penafsirannya dengan menyebut berbagai capaian dari teknologi modern ini semuanya ditujukan untuk kesejahteraan masyarakat.

Uraian tentang penafsiran Bakri Syahid di atas menunjukkan pengaruh sosial dan politik yang ia alami. Sebagai Jenderal TNI, tentu saja ia mendukung rencana Pembangunan Orde Baru. "Kampanye Pembangunan Nasional" yang terdapat dalam beberapa penjelasan *Tafsir Al-Huda* karya Bakri Syahid dapat dimaknai sebagai bentuk internalisasi mazhab "Pembangunanisme" ala Orde Baru ke dalam teks keagamaan (tafsir al-Qur'an). Al-Qur'an oleh Bakri diletakkan bukan hanya sebagai doktrin Islam, tetapi melalui penjelasannya, al-Qur'an menjadi landasan moral untuk pembangunan. Penafsiran politis dan kampanye program pembangunan Pemerintah yang terdapat dalam *Tafsir Al-Huda* juga mengarah pada suatu bentuk masyarakat yang rasional, menjaga ketertiban dan komitmen kebangsaan. Meski demikian, Bakri menjadikan *Tafsir al-Huda* untuk menampilkan tafsir agama yang "mendukung" kebijakan negara, tanpa menjadikan Islam ideologi politik.

Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa berdasarkan analisis terhadap 5 ayat yang ditafsirkan Bakri Syahid di atas menunjukkan bahwa Bakri menjadikan kitab tafsirnya sebagai instrumen untuk "mengampanyekan" program pembangunan nasional Pemerintah Orde Baru. Penafsiran Bakri bersifat politis karena mengemukakan dukungannya terhadap kebijakan Pemerintah. Bakri bahkan secara spesifik menyebut beberapa program utama Pemerintah, seperti menyebutkan program Pelita. Temuan lain dalam penelitian ini juga menunjukkan bahwa penafsiran bernuansa politis, tidak hanya terbatas pada

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

ayat-ayat politik, tetapi juga ayat yang tidak terkait dengan politik. Hal ini merupakan konsekuensi latar belakang dan konteks politik Bakri: ulama, akademisi dan agen Pemerintah.

Hasil penelitian ini selaras dan menguatkan tesis Nurul Huda, Izatul dan Hikmawati yang menyatakan bahwa semakin dekat mufasir dengan penguasa, maka nuansa penafsirannya akan mendukung gagasan penguasa. Tafsir al-Qur'an menjadi legitimasi kebijakan Pemerintah.

Daftar Pustaka

Awwaliyyah, Neny Muthiatul. "Studi Tafsir Nusantara: Tafsir al-Huda Tafsir Qur'an Basa Jawa Karya Jend. Purn. Drs. H. Bakri Syahid al-Yogjawy." *Nun* 7, no. 1 (2021): 122–124. https://doi.org/10.32495/nun.v7i1.231.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. "Working Papers." https://workingpapers.bappenas.go.id/index.php/bwp/article/view/557.

Federspiel, Howard M. *Popular Indonesian Literature of the Quran*. New York: Cornell University, Cornell Modern Indonesia Project, 1994.

Gadamer, Hans-Georg. *Truth and Method*. 2nd ed. London: Continuum, 1989.

Hamka. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, n.d.

Harahap, Rifqah, et al. *Perekonomian Indonesia: Teori dan Kebijakan dalam Konteks Pembangunan*. Sumbar: Penerbit Lenggo Geni Pustaka, 2026.

Harini, Sri. *Tasawuf Jawa*. Yogyakarta: Araska, 2019.

Heywood, Andrew. *Politics*. 4th ed. London: Palgrave Macmillan, 2013.

Katsir, Imaduddin Abu al-Fida' Ismail bin Umar bin. *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*. Maktabah Aulad Li Syakh al-Turast, 2000.

Kementerian Transmigrasi Republik Indonesia. "Informasi Kementerian Transmigrasi Lengkap." https://www.transmigrasi.go.id/profil/informasi-kementrans-lengkap/.

Maulidiyah, Izatul Muhidah, and Hikmawati Sultani. "Tafsir Al-Qur'an dan Kekuasaan: Membaca Pandangan Bakri Syahid tentang Nasionalisme dalam Tafsir Al-Huda." *Al-Qudwah: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hadis* 2, no. 1 (2024): 35–50. https://doi.org/10.24014/alqudwah.v2i1.29202.

Mannheim, Karl. *Ideology and Utopia: An Introduction to the Sociology of Knowledge*. New York: Harcourt, 1954.

Maarif, Nurul Huda. "Penafsiran Politik Kolonel Bakri Syahid Dalam Al-Huda: Tafsir Qur'an Basa Jawi." *Islam Nusantara: Journal for the Study of*

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

Islamic History and Culture 2, no. 2 (2021): 69. https://doi.org/10.47776/islamnusantara.v3i1.64.

Rahmawati, Rizki. "Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru." *Etnoshistori* 9, no. 2 (2022): 38.

Romarina, Arina, et al. *Perencanaan Pembangunan Daerah (Teori dan Praktik)*. Sleman: Deepublish Digital, 2024.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Tangerang: Lentera Hati, 2005.

Syahid, Bakri. *Tafsir Al-Huda*. Yogyakarta: Penerbit Bagus Arafah, 1977.

Syamsuddin, Sahiron. "Pendekatan dan Analisis dalam Penelitian Teks Tafsir." *Suhuf* 12, no. 1 (2019): 131–149. https://doi.org/10.22548/shf.v12i1.409.

Tim Penyunting. *Buku Seri Tempo: Rahasia-Rahasia Ali Murtopo*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia, 2024.

Winarno, Budi. *Etika Pembangunan*. Yogyakarta: Centre for Academic Publishing Service, 2013.

Wintolo, Djoko. *Kamus Istilah Geologi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2024.

"Warisan Arun NGL dan Jejak Suram Kota Petrodolar Lhokseumawe." *Project Multatuli*. https://projectmultatuli.org/warisan-arun-ngl-dan-jejak-suram-kota-petrodolar-lhokseumawe/.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir al-Munir fi al-Aqidah wa al-Syariah wa al-Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr, 2009.

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.